



## **BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat, efisien dan terpadu;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang industry dan Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembar Daerah Kabupaaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 04 seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pendaftaran dan Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/XII/1986 tentang Registrasi dan Izin Praktek Perorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi;
23. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/ Menkes /SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes /SK/VII/2003 tentang Pengobatan Tradisional;
34. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah
35. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/KB.401/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin;
6. Non Perizinan adalah : pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam tanda daftar usaha;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN

#### Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dengan jenis perizinan, terdiri dari :

a. Bidang Perizinan

1. Izin Lokasi
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Perdagangan;
4. Izin Reklame;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Pendaftaran Jasa Usaha Kepariwisataaan :
  - Izin Kawasan Objek Wisata;
  - Izin Wisata Tirta;
  - Izin Hotel;
  - Izin Restoran;
  - Izin Cafe;
  - Izin Jasa Boga;
  - Izin Perjalanan Wisata;
  - Izin Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - Izin Tempat Olahraga;
  - Izin Jasa Transportasi Wisata;
  - Izin Jasa Informasi Wisata;
  - Izin Spa;
8. Izin Praktek Dokter;
9. Izin Praktek Dokter Gigi;
10. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
11. Izin Praktek Bidan;
12. Izin Praktek Apoteker;
13. Izin Apotek;
14. Izin Toko Obat;
15. Izin Klinik;
16. Izin Balai Pengobatan;
17. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
18. Izin Usaha Toko Modern;
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
20. Izin Usaha Tradisional;
21. Izin Prinsip Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha;
25. Izin Usaha Perluasan;
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
27. Izin Usaha Perubahan;
28. Izin Mendirikan Sekolah Swasta;
29. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Kursus;
30. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa;
31. Izin Trayek

- 32. Izin Usaha Perkebunan :
    - Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
    - Izin Usaha Industri Pengolahan
    - Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi
  - 33. Izin Usaha Perikanan dan Perternakan
    - Izin Usaha Perikanan
    - Izin Usaha Peternakan
  - 34. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- b. Bidang Non Perizinan
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  2. Tanda Daftar Industri (TDI);
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  4. Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning);
  5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

### Pasal 3

- (1). Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
  - a. Penyelenggaraan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kabupaten;
  - b. Pemerosesan dan penandatanganan dokumen perizinan atas nama Bupati;
  - c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
  - d. Penyederhanaan prosedur perizinan;
  - e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  - f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2). Izin khusus mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (3). Perizinan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan izin yang bersifat prinsip atau usaha industri berskala menengah dan besar;

### Pasal 4

- (1). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan;
- (2). Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila :
  - a. pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai dan atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dengan masa tenggang waktu 3X24 jam;
  - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat peringatan terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala Dinas mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perizinan;

**BAB III**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN**  
**PENGAWASAN TEKNIS**

**Pasal 5**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas perizinan dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Terhadap jenis perizinan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini masih tetap dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

**Pasal 7**

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan ketentuan Peraturan ini;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
ARDHA MUNIR, SH, M.Si  
NIP. 196311111985031007

No	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Kewenangan Penerbitan izin	Penanggung jawab Tekhnis	
1	Izin Lokasi	DPMPTSP	PUPR	BPN
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	DPMPTSP	PUPR	DLH
3	Izin Usaha Perdagangan;	DPMPTSP	DISPERINDAG	
4	Izin Reklame;	DPMPTSP	PUPR	
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);	DPMPTSP	PUPR	
6	Izin Usaha Industri (IUI);	DPMPTSP	DISPERINDAG	
7	Pendaftaran Jasa Usaha Kepariwisataaan :	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Kawasan Objek Wisata	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Wisata Tirta;	DPMPTSP	PARIWISATA	DLH
	- Izin Hotel;	DPMPTSP	PARIWISATA	DLH
	- Izin Restoran	DPMPTSP	PARIWISATA	DLH
	- Izin Cafe;	DPMPTSP	PARIWISATA	DLH
	- Izin Jasa Boga	DPMPTSP	PARIWISATA	DLH
	- Izin Perjalanan Wisata;	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Rekreasi dan Hiburan Umum;	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Tempat Olahraga;	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Jasa Transportasi Wisata;	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Jasa Informasi Wisata;	DPMPTSP	PARIWISATA	
	- Izin Spa;	DPMPTSP	PARIWISATA	DLH
8	Izin Prakter Spesialis;	DPMPTSP	DINKES	
9	Izin Praktek Dokter Gigi;	DPMPTSP	DINKES	
10	Izin Praktek Perorangan;	DPMPTSP	DINKES	
11	Izin Praktek Bidan;	DPMPTSP	DINKES	
12	Izin Praktek Apoteker;;	DPMPTSP	DINKES	



13	Izin Apotek;	DPMPTSP	DINKES	
14	Izin Toko Obat;	DPMPTSP	DINKES	
15	Izin Klinik;	DPMPTSP	DINKES	
16	Izin Balai Pengobatan;	DPMPTSP	DINKES	
17	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;	DPMPTSP	DINKES	
18	Izin Usaha Toko Modern;	DPMPTSP	DISPERINDAG	
19	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;	DPMPTSP	DISPERINDAG	
20	Izin Usaha Tradisional ;		DISPERINDAG	
21	Izin Prinsip Penanaman Modal;	DPMPTSP	DPMPTSP	
22	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;	DPMPTSP	DPMPTSP	
23	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;	DPMPTSP	DPMPTSP	
24	Izin Usaha;	DPMPTSP	DPMPTSP	
25	Izin Usaha Perluasan;	DPMPTSP	DPMPTSP	
26	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;			
27	Izin Usaha Perubahan;		DPMPTSP	
28	Izin Mendirikan Sekolah Swasta;	DPMPTSP	DISDIK	
29	Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Kursus;	DPMPTSP	DISDIK	
30	Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa;	DPMPTSP	PUPR	
31	Izin Trayek;	DPMPTSP	DISHUB	
32	Izin Usaha Perkebunan :			
	- Izin Usaha Perkebunan B;	DPMPTSP	PERKEBUNAN	
	- Izin Usaha Pengolahan (Perkebunan);	DPMPTSP	PERKEBUNAN	
	- Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi;	DPMPTSP	PERKEBUNAN	
33	Izin Usaha Perikanan Dan Pertenakan			
	- Izin Usaha Perikanan	DPMPTSP	DISNAKKAN	
	- Izin Usaha Peternakan	DPMPTSP	DISNAKKAN	

34	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	DPMPTSP	DLH	
35	Izin Lingkungan	DPMPTSP	DLH	
36	Izin Pembuangan Air Limbah	DPMPTSP	DLH	
37	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	DPMPTSP		
38	Tanda Daftar Industri (TDI)	DPMPTSP	DISPERINDAG	
39	Tanda Daftar Gudang (TDG)	DPMPTSP		
40	Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)	DPMPTSP	PUPR	
41	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	DPMPTSP	DISPERINDAG	

BUPATI GAN ILIR,

  
M. ILYAS PANJI ALAM